

DR. HJ. Arifah Rosmajudi Jurnal 2022

by Cek Turnitin

Submission date: 06-Mar-2022 06:50PM (UTC-0600)

Submission ID: 1777931368

File name: DR._HJ._Arifah_Rosmajudi_Artikel_2022.docx (35.78K)

Word count: 2951

Character count: 21058

ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK

Arifah Rosmajudi
e-mail: arifahros@yahoo.co.id
STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

Abstract

The management of public administration, particularly related to demographic data, remains a classic problem that continues to arise in various regions. The management of population administration is the duty and responsibility of the government at both central and regional level, while this study aims to reveal the inhibiting and enabling factors for the management of population administration in the city of Tasikmalaya in accordance with applicable regulations. This type of research is descriptive with qualitative methods, with observational data collection techniques and in-depth interviews. The data analysis technique was performed through the steps of data reduction, data display, conclusion and verification. Based on the results of the study, it shows that there are inhibiting factors in the implementation of population administration, including the lack of good communication and coordination of employees in each kelurahan and sub-district. , between the sub-district and the population department of the city of Tasikmalaya. , as well as with the Central Statistical Agency for the city of Tasikmalaya so that the demographics have differences. Another factor is the lack of resources, especially at the kelurahan level, both of employees and of facilities and infrastructure to support the administration of the population, as well as the response or attitude of those responsible for the implementation. work is always lacking, associated with the lack of responsibility for validity or validity. population data by each implementation task related to population data in the city of Tasikmalaya.

Keywords: Public administration, public policy, population

Abstrak

Pengelolaan administrasi publik khususnya terkait dengan data kependudukan masih menjadi permasalahan klasik yang sampai saat ini masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Pengelolaan administrasi kependudukan merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, adapun penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan administrasi kependudukan di Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara secara mendalam. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan administrasi kependudukan diantaranya kurangnya komunikasi dan koordinasi baik dari pegawai di setiap kelurahan dengan kecamatan, antara kecamatan dengan Dinas Kependudukan Kota Tasikmalaya, serta dengan Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya sehingga data kependudukan menjadi memiliki perbedaan. Faktor lain kurangnya sumberdaya terutama di tingkat kelurahan, baik pegawai maupun sarana dan prasarana dalam mendukung administrasi kependudukan, serta respon atau sikap yang dimiliki oleh para

pelaksana masih kurang, ditambah dengan kurangnya tanggungjawab keabsahan atau validitas data kependudukan oleh masih-masing pelaksana tugas terkait dengan data kependudukan di Kota Tasikmalaya.

Kata kunci : Administrasi publik, kebijakan publik, kependudukan

Pendahuluan

Administrasi publik merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan yang umumnya dilaksanakan oleh setiap Negara. Dalam setiap negara, administrasi publik dilaksanakan di semua tingkatan, baik di tingkat pusat, menengah atau provinsi, maupun lokal/pemerintahan daerah. Hubungan antara berbagai tingkat pemerintahan, masalah administrasi publik yang berkembang pada saat ini masih menjadi perhatian khusus dalam upaya penyempurnaan data-data publik, dan dalam organisasi penyelenggaraan pengelolaan administrasi publik umumnya merupakan kumpulan dari orang-orang yang berstatus pegawai negeri sipil.

Istilah administrasi publik berasal dari gabungan dua kata, yaitu publik dan administrasi. Dalam segala bidang kehidupan sosial, ekonomi dan politik terdapat suatu administrasi, artinya agar organisasi atau lembaga dapat berjalan dengan baik harus diarahkan atau dikelola dengan baik, sehingga dari konsep inilah muncul gagasan tentang administrasi. Tentu saja, administrasi melibatkan berbagai institusi atau instansi melalui manajemen yang tepat, efisien dan efektif. Administrasi dapat berarti manajemen yang berhasil, dimana setiap pekerjaan dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi publik mengacu pada jenis administrasi yang secara khusus terkait dengan publik dan publik mengacu pada semua orang yang tinggal di wilayah tertentu.

Administrasi publik sebagai salah satu aspek dari konsep administrasi yang lebih umum, sehingga sebelum memahami pengertian administrasi publik, perlu dipahami terlebih dahulu arti dari kata administrasi. Administrasi berarti usaha kerjasama oleh sekelompok orang dalam mengejar tujuan bersama. Administrasi juga merupakan proses universal dan berlangsung dalam berbagai konteks kelembagaan. Berdasarkan kerangka kelembagaannya, administrasi dibagi menjadi administrasi publik dan administrasi swasta. Administrasi publik mengacu pada administrasi yang beroperasi dalam kerangka kerja pemerintah, sedangkan yang kedua mengacu pada administrasi yang beroperasi dalam kerangka non-pemerintah, yaitu perusahaan yang dilakukan secara komersial.

Pengertian secara umum administrasi publik terutama berkaitan dengan administrasi umum masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus luar biasa, administrasi publik mungkin berkaitan dengan bagian tertentu dari masyarakat. Namun dalam pengertian umum, administrasi untuk kepentingan umum yaitu administrasi publik, hal tersebut dikarenakan administrasi publik berurusan dengan publik, hal tersebut yang membedakan dengan administrasi swasta. Administrasi sangat penting karena tidak cukup hanya menulis kebijakan dan undang-undang di atas kertas. Menafsirkan dan menerjemahkan kebijakan dan undang-undang ini ke dalam tindakan dan menerapkannya merupakan salah satu bagian tersulit, sehingga administrator publik harus memainkan peran penting dalam mengelola pemerintah sebagai penggerak. Berbagai peran penting yang dimainkan oleh administrasi publik, yang terpenting dalam pelaksanaan undang-undang dan kebijakan serta perannya sebagai arbiter.

Tugas dan tanggung jawab sehari-hari administrator publik sangat bervariasi tergantung pada jenis organisasi tempat bekerjanya, benang merah di antara administrator publik paling sering terjadi yaitu komitmen yang mendalam untuk melayani kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada perbaikan kinerja secara keseluruhan. Istilah pelayanan publik sering digunakan dalam bidang administrasi publik, dan keinginan untuk melayani kepentingan publik inilah yang memanggil orang untuk menjadi administrator publik. Pentingnya administrasi publik terletak dalam melayani masyarakat secara luas.

Administrasi publik berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah dan merupakan disiplin akademis yang mempelajari implementasi ini dan mempersiapkan pegawai negeri untuk bekerja dalam pelayanan publik. Sebagai bidang penyelidikan dengan cakupan yang beragam, tujuan mendasarnya untuk memajukan manajemen dan kebijakan agar pemerintah dapat berfungsi dengan baik. Administrasi publik pada dasarnya berkaitan dengan pengorganisasian kebijakan dan program pemerintah serta perilaku pejabat yang secara resmi bertanggung jawab atas tugas dan tanggungjawabnya. Definisi administrasi publik adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk merumuskan, menerapkan, dan mengelola keputusan dan kebijakan publik. (Chandler, Ralph C., 1988).

Penyelenggaraan administrasi publik pemerintahan diatur melalui berbagai kebijakan atau peraturan agar dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh Pemerintah yang umumnya dituangkan dalam bentuk peraturan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Kebijakan publik menurut Dye (Islamy, 2004) menyatakan "*Is whatever governments choose to do or not to do*", dapat diterjemahkan apapun yang menjadi pilihan pemerintah dengan melakukan atau tidak melakukan merupakan sebuah kebijakan. Setiap kebijakan perlu diimplementasikan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses pencapaian tujuan dalam pelaksanaan kebijakan pada umumnya akan dihadapkan pada faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat, sehingga diperlukan analisis yang mendalam.

Pelayanan bidang administrasi publik di Indonesia saat ini masih menjadi sorotan publik dikarenakan dalam pelayanannya masih dirasakan belum sesuai yang diharapkan. Semua negara saat ini menghadapi tantangan yang sama, yaitu perlunya memodernisasi sistem administrasi. Berdasarkan hasil penelitian modernisasi administrasi publik di Jerman ditempatkan sebagai proses budaya administrasi yang dibentuk oleh tradisi. Model tersebut berfokus pada perubahan pola hubungan masyarakat dan negara, dimana tidak semuanya dijalankan oleh negara, namun dalam beberapa kasus masyarakat memiliki kebebasan untuk mengurus dirinya sendiri. Rasionalisasi ke dalam, yakni penciptaan model organisasi publik yang lebih mandiri dan non-hierarkis, selama ini menjadi kendala yaitu meninjau struktur yang lebih fleksibel untuk beradaptasi dengan perkembangan dan menempatkan personel yang kompeten, dan Thivatisasi dan pengaturan dilakukan dengan mengurangi peran negara dalam berbagai hal yang dapat dikelola oleh masyarakat, dimana dalam hal ini pemerintah lebih terlihat sebagai manajer. Model modernisasi administrasi publik di Jerman mengutamakan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan, dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat (Pitschas, 2005).

Administrasi publik berarti pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana negara dan pelaksanaan kebijakan dan keputusan pemerintah. Dapat dikatakan juga bahwa administrasi publik berarti pelaksanaan urusan atau keputusan

pemerintah yang telah dibuat dan tuang lingkup atau fungsi utama dari administrasi publik yaitu untuk menegakkan kebijakan pemerintah dan pengelolaan yang tepat dari urusan pemerintahan. Masalah administrasi masih sering terjadi di berbagai daerah, dimana salah satunya hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan KMS di bidang pendidikan Pemerintah Kota Yogyakarta, menunjukkan dalam pendataan datannya oleh petugas belum efektif disamping subjektivitas yang masih tinggi, dan sosialisasi yang masih kurang, serta struktur yang kompleks. Sementara disamping itu komunikasi dan koordinasi masih menjadi hambatan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta masih adanya campur tangan dari anggota legislatif dalam pelaksanaan KMS; masih terjadinya inkonsistensi sosialisasi yang diberikan, memiliki birokrasi yang , dan kesadaran warga yang masih kurang (Sidik, 2014).

Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan masalah program-program sosial yang digulirkan oleh Pemerintah diantaranya kurang akuratnya data kependudukan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, seperti jumlah penduduk, jumlah warga kategori miskin atau kurang mampu yang berhak mendapatkan bantuan sosial serta masalah-masalah lainnya. Masalah data kependudukan terjadi juga di Kota Tasikmalaya, padahal dalam proses pengelolaan administrasi kependudukannya telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017, dan langkah lain yaitu dengan mendelegasikan serta wewenang kepada Lurah dan/atau Camat untuk menyelenggarakan sebagian urusan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai kebutuhan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya pengelolaan data kependudukan menunjukkan adanya perbedaan antar data kependudukan di tingkat kelurahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta data kependudukan yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya.

2 Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk kedalam deskriptif, dengan metode penelitian yang digunakan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif atau interrogatif dan berusaha untuk memahami apa yang terlihat. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana orang hidup; apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka menggunakan sesuatu, atau apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari (Moleong, 2017).

Data kualitatif lebih deskriptif daripada numerik, dan mencari konteks terkait dengan persepsi orang. Peneliti menggabungkannya untuk memahami alasan dan motivasi di balik perilaku tertentu. Pada dasarnya, data kualitatif dapat memberi tahu peneliti tentang objek penelitian. Salah satu cara untuk mengumpulkan data yaitu melalui observasi/survei dan wawancara secara mendalam terhadap narasumber yang mempunyai informasi penting terkait objek penelitian yang selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menjawab dari pertanyaan penelitian.

Pembahasan

Pengelolaan administrasi publik yang menjadi fokus Pemerintah saat ini salah satunya berkaitan dengan data kependudukan, yang sering dijadikan dasar dalam berbagi perencanaan pembangunan sampai dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Data demografi sangat penting untuk tujuan perencanaan pembangunan yang

diselenggarakan baik untuk tingkat pusat maupun daerah. Setiap tingkat pemerintahan perlu adanya data tersebut mengetahui ukuran dan komposisi penduduknya, diantaranya berkaitan dengan usia dan struktur gender, informasi data-data tentang sebaran tempat tinggal dan bekerjanya, tingkat sosial masyarakat yang akan membantu dalam penyediaan merencanakan berapa banyak sekolah, klinik, rumah sakit, dan pekerjaan yang dibutuhkan suatu daerah.

Data kependudukan yang akurat dapat memudahkan baik Pemerintah Pusat maupun daerah dalam merencanakan berbagai program pembangunan, maupun program-program sosial yang digulirkan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, dimana pada saat ini masih menjadi masalah-masalah dilapangannya. Data demografis memiliki peran penting terutama dalam melaksanakan atau mengimplemetasikan sebuah kebijakan oleh pemeirntah. Data demografi memberikan informasi tentang populasi di daerah, diantaranya menurut usia, jenis kelamin, tempat tinggal dan status perkawinan, selain variabel seperti pendapatan, etnis, tingkat pendidikan dan masalah sosial lainnya, yang mencerminkan struktur penduduk dan dapat memberikan informasi tentang karakteristik demografis seperti distribusi dan kepadatan penduduk, serta tren urbanisasi, dimana data demografis merupakan dasar penting untuk perencanaan kebijakan.

Pendataan penduduk merupakan bagian dari administrasi publik, dimana dari hasil penelitian ini menunjukan data kependudukan sering terjadi perbedaan diantara penyelenggara pemerintahan, mulai dari data yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tasikmalaya, dengan data yang diberikan oleh Data Kependudukan oleh Kelurahan, serta terdapat juga perbedaan dengan Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya. Perbedaan data kependudukan yang terjadi seperti pada tahun 2020, dimana BPS mencatat jumlah penduduk Kota Tasikmalaya mencapai 662.000 jiwa, sedangkan data pada Disdukcapil sebanyak 725.561 jiwa. Sementara untuk tahun 2021, Disdukcapil mencatat jumlah penduduk sebanyak 731.048 Jiwa, sedangkan BPS Kota Tasikmalaya mencatat sebanyak 723.920 jiwa, belum adanya perbedaan data kependudukan dengan setiap kelurahan yang ada.

Berdasarkan data penelitian tersebut menunjukan administrasi publik berkaitan dengan data kependudukan di Kota Tasikmalaya masih menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya perbedaan data kependudukan diantara pelaksana kebijakan. Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan administrasi kependudukan hasil penelitian ini dilihat dari;

Faktor komnikasi, dimana komunikasi memiliki peran penting dalam tercapainya pelaksanaan tugas dalam setiap organisasi. Komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Tasikmalaya belum berjalan dengan baik, sehingga terdapat perbedaan data yang tersaji di tingkat kelurahan/kecamatan dengan Diskukcapil Kota Tasikmalaya, sedangkan kedua instansi tersebut sama-sama memiliki tugas dalam pengelolaan kependudukan yang diatur berdasarkan peraturan yang berlaku. Lemahnya komunikasi dan koordinasi diantara penyelenggara administrasi kependudukan tersebut tentu akan mengakibatkan penyajian data yang berbeda, sehingga akan mengakibatkan terhadap perencanaan pembangunan maupun berbagai program-program sosial yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah.

Menurut hasil penelitian dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan adanya strategi komunikasi yang dilaksanakan oleh manajemen BPS Kota Padang dengan menggunakan strategi komunikasi yang diawali dari tahapan

perencanaan sampai dengan evaluasi. Strategi komunikasi yang dilakukan yaitu melalui berbagai media yang ada berkaitan dengan sensus penduduk kepada masyarakat disamping melalui sosialisasi secara langsung. Adapun bentuk komunikasi lainnya yang dilakukan oleh implementor dengan melakukan komunikasi tatap muka secara langsung dengan masyarakat Kota Padang (Mila, Wakidul Kohar, 2018).

Komunikasi membantu semua pegawai maupun pimpinan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dan tanggung jawabnya. Komunikasi dalam organisasi dapat dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, akhir pekerjaan sampai dengan evaluasi pekerjaan. Semua informasi penting harus dikomunikasikan diantara pelaksana tugas maupun kepada pimpinan agar suatu tugas pekerjaan dapat mencapai tujuan yang diharapkan semua pihak. Organisasi (Disdukcapil) membutuhkan komunikasi yang efisien dan efektif dengan organisasi lainnya yang terkait, dalam hal ini dengan BPS Kota Tasikmalaya, disamping penting **nya** seorang pemimpin melakukan komunikasi secara efektif dengan para pegawainya **untuk mencapai tujuan organisasi, dalam hal ini pihak Camat dan para lurah** terkait dengan pengelolaan data kependudukan di daerahnya masing-masing.

Faktor sumberdaya, dalam hal ini terkait dengan ketersediaan sumberdaya manusia, sarana prasarana dalam mendukung tugas pekerjaan pegawai, dan ketersediaan layanan informasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan untuk pengelolaan administrasi kependudukan sesuai dengan kebijakan yang ada, sumberdaya manusia atau pegawai di tingkat kelurahan di Kota Tasikmalaya masih kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas yaitu terkait dengan kemampuan kerja sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Aspek lainya yaitu kurangnya sarana prasarana penunjang, diantaranya ketersediaan fasilitas teknologi dan informasi sehingga dalam pengelolaan administrasi kependudukan menjadi kurang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya fasilitas yang memadai menghambat terhadap penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan (Tarifu, 2019). Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keuangan diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Kurangnya sumber daya yang tepat membuat implementasi kebijakan menjadi sangat sulit terlaksana. Keberhasilan implementasi kebijakan selain komunikasi diperlukan adanya dukungan sumber daya, baik ketersediaan implementor, sarana dan prasarana pendukung, ketersediaan informasi, serta ketersediaan anggaran dengan dukungan dari para pemangku kepentingan. Ketersediaan sumberdaya perlu dipersiapkan sebelum sebuah kebijakan diimplementasikan, sehingga memudahkan para implementor dalam mencapai tujuan kebijakan.

Faktor disposisi atau sikap dari para implementor memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan pengelolaan administrasi kependudukan yang merupakan salah satu tugas pemerintah dalam layanan publik. Setiap pelaksana tugas pengelolaan administrasi kependudukan, baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun Disdukcapil Kota Tasikmalaya, serta pihak BPS Kota Tasikmalaya diperlukan adanya kesepahaman, sikap saling memahami dan dapat bekerjasama dengan baik sehingga dapat bekerjasama menyajikan data yang akurat dan kesamaan persepsi dalam pengelolaan data kependudukan untuk berbagai kepentingan dalam pemerintahan Kota Tasikmalaya. Masing-masing instansi dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada peraturan yang berlaku, namun demikian komunikasi dan koordinasi, serta saling bekerjasama menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu menyajikan data kependudukan yang akurat dan akuntabel.

3 Disposisi atau sikap para pelaksana merupakan faktor penting dalam pendekatan implementasi kebijakan, dimana disposisi atau sikap pelaksana ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan sikap pelaku untuk melakukan dengan sungguh-sungguh agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi berperan penting dalam implementasi kebijakan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Kota Makassar. Berdasarkan hal tersebut memperjelas bahwa disposisi atau sikap dari implementor dengan berbagai kebijakan, dalam pelaksanaannya diperlukan sikap respon, memiliki empati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dengan berbagai pihak terkait lainnya.

Faktor selanjutnya dilihat dari struktur birokrasi, baik Disdukcapil Kota Tasikmalaya, seluruh kecamatan dengan perangkat kelurahannya telah terstruktur dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi di tingkat kelurahan masih banyaknya kekosongan SDM sehingga menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan pengelolaan kependudukan. Selanjutnya BPS Kota Tasikmalaya juga telah dilengkapi dengan organ organisasi yang lengkap, dengan berbagai dukungan yang cukup memadai dalam mencapai tugasnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas hal yang terpenting adanya kerjasama diantara instansi terkait dalam melakukan survey maupun pendataan penduduk di Kota Tasikmalaya, sehingga tidak adanya perbedaan yang dapat membingungkan dalam pengambilan kebijakan untuk Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan administrasi publik terkait dengan kependudukan di Kota Tasikmalaya, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturannya belum berjalan dengan cukup baik, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat, diantaranya kurangnya komunikasi dan koordinasi diantara pelaksana kebijakan, yaitu antara pihak kelurahan dengan kecamatan, kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, serta kesamaan data yang disajikan dengan pihak Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya. Diperlukan ketersediaan pegawai di tingkat kelurahan, sarana dan prasarana kerja dalam mendukung terselenggaranya administrasi kependudukan di Kota Tasikmalaya, serta semua pihak dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan yang sama.

9 Daftar Pustaka

- Chandler, Ralph C., J. P. (1988). *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons.
- Islamy, I. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika.
- Mila, Wakidul Kohar, I. (2018). Strategi Komunikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Sensus Penduduk Kepada Masyarakat. *JISPO*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/3740>
- 13 Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Pitschas, R. (2005). State And Modernisation Of Public Administration In Germany. *JKAP*, 9. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8327>

10

Sidik, F. (2014). Implementasi Kebijakan Kartu Menuju Sehat (KMS) Pemerintah Kota Yogyakarta di Bidang Pendidikan. *JKAP*, 18.

8

<https://jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7512>
Tarifu, L. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. *Publicuho*, 3(q).

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

library.um.ac.id

Internet Source

2%

2

123dok.com

Internet Source

2%

3

Siti Rohayati, Leo Agustino, Rina Yulianti.
"PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN
NYAPAH KECAMATAN WALANTAKA KOTA
SERANG", Jurnal Kebijakan Pembangunan
Daerah, 2021

Publication

1%

4

peraturan.bpk.go.id

Internet Source

1%

5

eudl.eu

Internet Source

1%

6

Submitted to Sogang University

Student Paper

1%

7

jurnal.fkip-uwgm.ac.id

Internet Source

1%

8	ojs.uho.ac.id Internet Source	1 %
9	id.scribd.com Internet Source	1 %
10	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	1 %
11	ia803102.us.archive.org Internet Source	1 %
12	www.coursehero.com Internet Source	1 %
13	simakip.uhamka.ac.id Internet Source	<1 %
14	sofyan-madina.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	Submitted to University of Birmingham Student Paper	<1 %
16	ejournal.umm.ac.id Internet Source	<1 %
17	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.lontar.ui.ac.id Internet Source	<1 %
19	anzdoc.com Internet Source	<1 %

20	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
21	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
22	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	<1 %
23	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
24	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
25	www.scribd.com Internet Source	<1 %
26	Dionysia Nova Ardiana, Ajeng Ayu Widiastuti. "Penerapan Pendekatan BCCT di KB-TK Realfunrainbow Preschool Salatiga", Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2020 Publication	<1 %
27	Rahmad Hidayat, M. Ulfatul Akbar Jafar, Eni Astuti H. M. Nur. "Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2019 Publication	<1 %

28	core.ac.uk Internet Source	<1 %
29	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1 %
30	perpustakaan.bappenas.go.id Internet Source	<1 %
31	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
32	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
33	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository.unj.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
36	www.neliti.com Internet Source	<1 %
37	elitasuratmi.wordpress.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

DR. HJ. Arifah Rosmajudi Jurnal 2022

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
